

**PERANAN MOHAMMAD NATSIR PADA MASA
DEMOKRASI PARLEMENTER
TAHUN 1950-1958**

ARTIKEL



Oleh :

DWI PURWONO

NPM. 1114440055

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Dwi Purwono, Peranan Mohammad Natsir Pada Masa Demokrasi Parlementer Tahun 1950-1958. **Skripsi. Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juli 2015.**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui latar belakang kehidupan Mohammad Natsir, untuk mengetahui kehidupan politik pada masa Demokrasi Parlementer, dan untuk mengetahui tindakan Mohammad Natsir pada masa Demokrasi Parlementer.

Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah studi literatur yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan. Adapun langkah-langkahnya dengan heuristik, kritik sumber (kritik intern maupun kritik ekstern), interpretasi (penafsiran), dan historiografi.

Hasil penulisan skripsi ini menyimpulkan bahwa peranan yang cukup menonjol revolusi ditunjukkan oleh Natsir, seperti perjuangannya dalam beberapa perundingan dengan Belanda, menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII), menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), ketua Partai Masyumi, Menteri Penerangan dan yang paling menonjol adalah perannya dalam menyatukan kembali Republik Indonesia melalui “Mosi Integral”. Pada tahun 1950, Natsir diberi kesempatan untuk membentuk kabinet. Pada saat yang telah memungkinkan, menurut Natsir, perjuangan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam negara tersebut dapat diwujudkan. Bagaimanapun beratnya pekerjaan sebagai perintis pertama pembangunan NKRI, semua problem negara tetap dihadapi dengan bijaksana oleh Mohammad Natsir. Berjuang dengan tabah, membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara agar memahami realitas kebhinekaan, bukan untuk dipertengkarkan. Melainkan agar disadari bahwa keragaman hakikatnya adalah satu kesatuan. Pekerjaan dan perjuangan yang berat tidak mungkin berhasil secepat membalik telapak tangan atau secara instan dan segera jadi.

Kata Kunci : Demokrasi Parlementer, Peranan Mohammat Natsir.

ABSTRACT

Dwi Purwono, The Roles of Mohammad Natsir during Parliamentary Democracy Era Year 1950-19958. **Thesis.Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education PGRI University Yogyakarta,July 2015.**

The aim of this thesis is to discover the life background of Mohammad Natsir, to discover the politic life during Parliamentary Democracy Era, and to discover Natsir's actions in the Era of Parliamentary Democracy.

The method employed in the research is literary study that involves collecting relevant books. Meanwhile necessary steps include heuristic, source criticism (both internal criticism and external criticism), interpretation and historiography.

The result of the research concludes several noticeable and revolutionary roles of Natsir, like his effort in several talks with the Dutch, becoming a member of Islamic Party of Indonesia (PII), a member of Central National Committee of Indonesia (KNIP), the chairman of Masyumi Party, Minister of Information and the most significant is his role in reuniting The Republic of Indonesia through "Integral Motion". During the year of 1950, Natsir was given a chance to set up a cabinet. Back then it seemed possible, according to Natsir, to implement Islamic values and such country can be brought to existence. However difficult the struggle as a pioneer of NKRI was, all state problems must be faced with prudence by Mohammad Natsir. He persevered in his effort, building public awareness about the importance of national and state lives as to help them recognize the reality of diversity, and not to quarrel over it, but to understand that the essence of the diversity is unity. Such taxing duty and heavy struggle could not be possibly completed quickly in the blinking of an eye or instantaneously.

Keywords: Parliamentary Democracy, Roles of Mohammad Natsir.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi Parlemerter adalah bentuk Pemerintahan yang paling sensitif terhadap keinginan dan kebutuhan rakyat. Pemerintahan ini yang paling mudah dapat memberikan perlindungan kepada bagian dari masyarakat kita yang membutuhkan perlindungan. Demokrasi Parlemerter adalah bentuk pemerintahan yang paling mampu meningkatkan kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya rakyat kita.

Mohammad Natsir adalah putra keluarga sederhana, dilahirkan di daerah Minangkabau yang merupakan daerah yang mempunyai peranan besar dalam penyebaran cita-cita pembaharuan agama Islam. Nama ayahnya, Idris Sutan Saripado adalah seorang juru tulis pada sebuah kantor pemerintahan di Alahan Panjang. Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 dari ibu yang bernama Khadijah di Kampung Jembatan Berukir, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatra Barat.

Bagi Natsir Politik adalah sebuah seni yang memerlukan kehalusan dan keindahan tersendiri. Dalam memperjuangkan sesuatu di tahun 1950, kita harus mencapai sasaran tanpa lawan-lawan merasa terkalahkan. Natsir mencoba menerapkan pandangannya ini ketika ia berusaha keras untuk menggoalkan “mosi integral” yang di rancang di DPR, sebagai upaya yang

dianggapnya paling baik untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) (Djaini Abibullah, 1996: 5).

Pada tanggal 3 April 1950 akhirnya “mosi Integral” diterima secara utuh oleh DPR dan atas dasar itu Perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk secara bersama-sama melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada pihak-pihak yang merasa terkalahkan.

Kabinet Parlemerter yang ditentukan oleh UUD 1950 hanya mungkin terbentuk dengan koalisi partai, terutama karena komposisi parlemen tidak memungkinkan pembentukan kabinet oleh satu partai saja. Namun kesulitan segera muncul saat mengupayakan kabinet pertama pada masa demokrasi parlementer sesuai dengan UUD tersebut (Waluyo, 2009: 79).

Membentuk Negara Kesatuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi Indonesia kembali kepada negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Pada tanggal 21 Agustus 1950 Presiden Soekarno menggunakan hak prerogatifnya menunjuk Mohammad Natsir, Ketua Dewan Eksekutif Masyumi. Partai yang memiliki jumlah wakil terbesar di Parlemen (DPR), untuk bertindak sebagai *formateur* kabinet (Djaini Abibullah, 1996: 33).

Kabinet Natsir yang terbentuk 6 September 1950 tersebut dikenal sebagai *zaken kabinet*, komposisi anggota kabinetnya terdiri dari 4 orang

Masyumi, 2 PSI, 2 PIR, 2 Kristen (Katolik dan Protestan), 1 PSII, 1 Demokrat, dan 4 tanpa partai. Beberapa partai yang ikut serta dalam Kabinet Natsir, adalah baru dan belum pernah muncul selama periode kabinet RIS-Hatta (Waluyo, 2009: 82).

Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum pengunduran diri Natsir, Soekarno selaku presiden sekaligus ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI) terus mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta.

M. Natsir adalah seorang demokrat sejati. Ia memulai karir politiknya dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938. Berkat perjuangan pada tahun 1940-1942, ia diangkat sebagai ketua partai. Ia juga diangkat sebagai abdi negara oleh pemerintah sebagai kepala pendidikan Kodya Bandung sampai tahun 1945, sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta.

Puncak karier politiknya adalah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), ketua Partai Masyumi, Menteri Penerangan dan juga pernah menjadi Perdana Menteri RI pada masa pemerintahan Soekarno. Dalam karir politik, M. Natsir pernah membuat langkah-langkah

strategis khususnya dalam mengangkat mosi pada sidang Perlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950.

Natsir menaruh harapan yang besar terhadap keberadaan lembaga-lembaga demokrasi yang telah ada dan dipilih rakyat, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis.

Munculnya Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara yang berupa tuntutan terhadap pemerintah pusat. Pada 13 Februari 1958, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan keputusan pemerintah tentang penolakan terhadap tuntutan Padang. Dilanjutkan dengan pemutusan hubungan laut dan udara dengan Sumatera Utara (Waluyo, 2009: 134).

Tuntutan akhirnya tidak dipenuhi dan bahkan dijawab dengan gerakan militer, maka PRRI diumumkan oleh Dewan Perjuangan. Dalam Kabinet PRRI, Syaifuddin menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Mohammad Natsir sebagai Juru Bicara dan Burhanudin sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Mohammad Natsir?
2. Bagaimana situasi politik pada masa Demokrasi Parlementer?
3. Bagaimana tindakan Mohammad Natsir pada masa Demoktasi Parlementer ?

C. Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode studi literatur yang meliputi pengidentifikasian, penjelasan, penguraian secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani "*Heurischein*" yang artinya mencari atau mengumpulkan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain dari buku-buku perpustakaan, artikel, internet dan lain-lain.

2. Kritik Sumber

Setelah semua data dalam berbagai kategori terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan uji:

- a. Keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dengan langkah menguji sumber-sumber itu merupakan jejak sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Keabsahan tentang kesahihan sumber yang dilakukan melalui kritik intern dengan langkah melihat kebenaran informasi dari penulis dan

kemampuannya dalam menyatakan sesuatu dengan tepat berdasarkan pada sumber-sumber autentik lainnya.

3. Interpretasi

Interpretasi sering juga disebut dengan analisis data, ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatukan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut dianalisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya dan disintesis agar memperoleh hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

4. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dari awal hingga akhir. Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu historiografi atau sering disebut dengan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berupa skripsi sejarah.

Dalam penyusunan ini terdiri dari tiga bagian yaitu: pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Setiap bagian dijabarkan dalam bab atau sub bab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat. Namun, diantara masing-masingnya terdapat benang merah yang saling berhubungan.

PEMBAHASAN PENULISAN SKRIPSI

Mohammad Natsir adalah putra keluarga sederhana, dilahirkan di daerah Minangkabau yang merupakan daerah yang mempunyai peranan besar dalam penyebaran cita-cita pembaharuan agama Islam. Nama ayahnya, Idris Sutan Saripado adalah seorang juru tulis pada sebuah kantor pemerintahan di Alahan Panjang. Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 dari ibu yang bernama Khadijah di Kampung Jembatan Berukir, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di lingkungan Surau, Natsir kecil diperkenalkan pada dinamisme kehidupan rantauan yang kelak akan dialaminya pada situasi yang lebih konkret, di mana seorang perantau harus meninggalkan kampung halamannya. Aspek spiritual yang relatif kokoh dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat Minangkabau secara luas, merupakan modal yang sangat berharga bagi Natsir. Lingkungan religius mempengaruhi cara pandang dan pola pikir Natsir. Islam bukan hanya menjadi ajaran ketauhidan dan aqidah, namun menjadi parameter hukum keseharian orang Minangkabau.

Natsir bersekolah di HIS Adabiyah Padang sampai saat ayahnya menjemput Natsir untuk bersekolah di HIS Pemerintahan di Solok. Dari HIS Solok Natsir kemudian pindah ke HIS Pemerintahan di Padang. Di HIS Padang Natsir belajar kurang lebih selama tiga tahun hingga tamat pada tahun 1923. Atas dukungan dan restu dari orangtuanya dan tekatnya yang

bulat Natsir melanjutkan ke MULO Padang dengan beasiswa karena prestasi yang ia capai di HIS. Di MULO Padang, Natsir mulai berkenalan dengan organisasi-organisasi pelajar dan ke pemudaan. Pertama ia masuk ke Jong Sumatranen Bond kemudian ia masuk Jong Islamieten Bond. Dengan berorganisasi inilah Natsir mulai membuka pandangannya tentang realitas bangsanya dan wacana politik yang tengah berlangsung, suatu kenyataan bahwa bangsanya tengah diperlakukan secara tidak adil oleh penguasa kolonial.

Setelah ia menyelesaikan pendidikan di MULO pada tahun 1927, Natsir berkeinginan merantau ke Bandung untuk melanjutkan menuntut ilmu di *Algemene Middelbare School* (AMS) dengan bekal beasiswa. Setelah Natsir memperdalam pengetahuannya tentang ilmu pendidikan, maka setelah tamat AMS pada tahun 1931, Natsir melanjutkan untuk mengikuti kursus guru diploma L.O dan tamat pada tahun 1932.

Pada tahun 1927 Natsir berkeinginan untuk mendalami Islam di Bandung, ketika di AMS minatnya tentang agama Islam berkembang. Karir sebelum terjun ke politik dimulai dengan bergabung dengan persatuan Islam (Persis). Pada 1928, Natsir telah turut menerbitkan artikel dalam jurnal Persis yang bernama *Pembela Islam*. Satu tahun setelah bergabung dengan Persis, yakni 1929 Natsir kemudian juga menjadi anggota Jong Islamieten Bond cabang Bandung. Kiprah Natsir dalam bidang pendidikan di Bandung dan sebagai sekertaris STI (Sekolah Tinggi Islam) di Jakarta yang dipimpin Mohammad Hatta.

Dalam memperjuangkan sesuatu di tahun 1950, kita harus mencapai sasaran tanpa lawan-lawan merasa terkalahkan. Natsir mencoba menerapkan pandangannya ini ketika ia berusaha keras untuk menggoalkan “mosi integral” yang di rancang di DPR, sebagai upaya yang dianggapnya paling baik untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada tanggal 3 April 1950 akhirnya “mosi Integral” diterima secara utuh oleh DPR dan atas dasar itu Perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk secara bersama-sama melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada pihak-pihak yang merasa terkalahkan. Parlemen menerima mosi yang kemudian terkenal dengan sebutan “Mosi Integral Natsir” dan dengan demikian pemerintah dapat melakukan langkah untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi Indonesia kembali kepada Negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem Parleментар.

Kabinet Natsir yang terbentuk 6 September 1950 tersebut dikenal sebagai *zaken kabinet*, komposisi anggota kabinetnya terdiri dari 4 orang Masyumi, 2 PSI, 2 PIR, 2 Kristen (Katolik dan Protestan), 1 PSII, 1 Demokrat, dan 4 tanpa partai. Reaksi terhadap komposisi kabinet tersebut bermacam-macam, tetapi semuanya sependapat bahwa tindakan Natsir dinilai sangat berani.

Pada 25 Desember 1951, Hadikusumo dari PNI mengajukan mosi di Parlemen, isi mosi tersebut adalah desakan untuk menarik (menghapus) PP

No. 39 tersebut dan membekukan berfungsinya seluruh dewan daerah di provinsi-provinsi. Dengan diterimanya mosi Hadikusumo memang sangat melemahkan kedudukan Kabinet Natsir. Akhirnya Mohammad Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno.

Peranan Mohammad Natsir dan perjuangan konstituante, dari hasil pemilihan umum telah mempertegas polarisasi antara partai-partai Islam dan non-Islam serta menghasilkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan sebagaimana terlihat pada perbandingan perolehan kursi baik dalam parlemen maupun pada lembaga konstitusi. Natsir dan para pemimpin Masyumi memandang Konstituante sebagai arena perjuangan untuk meralisasikan cita-cita umat Islam yang telah dijanjikan selama masa kampanye 1954 dan 1955.

Mohammad Natsir adalah seorang demokrat sejati. Ia memulai karir politiknya dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938. Berkat perjuangan pada tahun 1940-1942, ia diangkat sebagai ketua partai. Ia juga diangkat sebagai abdi negara oleh pemerintah sebagai kepala pendidikan Kodya Bandung sampai tahun 1945, sekaligus merangkap sebagai Sekertaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta.

Puncak karier politik Mohammad Natsir adalah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), ketua Partai Masyumi, Menteri Penerangan dan juga pernah menjadi Perdana Menteri RI pada masa

pemerintahan Soekarno. Dalam karir politik, Mohammad Natsir pernah membuat langkah-langkah strategis khususnya dalam mengangkat mosi pada sidang Perlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Ini dikenal dengan mosi integral Natsir. Mosi ini adalah menyatukan Republik Indonesia yang telah terpecah menjadi 17 negara bagian. Hal ini sebagai akibat dari Konferensi Meja Bundar (KMB), kemudian kembali kepada pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya mosi inilah, ia dapat tampil pada puncak pemerintahan.

Pada 21 Februari 1957, Presiden Sukarno mengumumkan apa yang dikenal kemudian sebagai Konsepsi Presiden, di hadapan para pemimpin partai politik dan pemimpin ABRI. Konsep ini kemudian merupakan konsep Demokrasi Terpimpin. Natsir kemudian menaruh harapan yang besar terhadap keberadaan lembaga-lembaga demokrasi yang telah ada dan dipilih rakyat, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis.

Munculnya piagam perjuangan menyelamatkan negara yang berupa tuntutan terhadap pemerintah pusat. Pada 13 Februari 1958, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan keputusan pemerintah tentang penolakan terhadap tuntutan Padang. Dilanjutkan dengan pemutusan hubungan laut dan udara dengan Sumatera Tengah.

Tuntutan daerah akhirnya tidak dipenuhi dan bahkan dijawab dengan gerakan militer, maka PRRI diumumkan oleh Dewan Perjuangan. Dalam Kabinet PRRI, Syaifuddin menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Mohammad Natsir sebagai Juru Bicara dan Burhanudin sebagai

Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan. Pemerintahan pusat yang menghadapi PRRI dengan kekuatan militer jelas bukan imbang kekuatan pasukan daerah bergolak. Para pemimpin PRRI yang meyerahkan diri dan dikenakan hukuman tanpa ada jalan pengadilan. Karena PRRI dikatakan sebagai gerakan yang melawan pemerintahan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai “Peranan Mohammad Natsir Dalam Demokrasi Parleментар tahun 1950-1958”, maka dapat diambil kesimpulan baik dari segi historis maupun dari segi paedagogis sebagai berikut:

A. Kesimpulan Historis

Mohammad Natsir lahir pada pada 17 Juli 1908, Natsir adalah putra keluarga sederhana, dilahirkan di daerah Minangkabau yang merupakan daerah yang mempunyai peranan besar dalam penyebaran cita-cita pembaharuan agama Islam. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, Natsir kecil di malam hari tidur di Surau dengan teman sebayanya. Kebiasaan yang demikian sudah merupakan hal yang membudaya di daerah Minang yang lebih kurang sama dengan kebiasaan merantau. Pada tahun 1909 Natsir masuk pendidikan formal di Padang HIS Adabiyah, ia tidak bisa memasuki HIS Pemerintahan karena terbentur dengan realitas bahwa orangtuanya hanyalah pegawai rendahan. Pada tahun 1927 Natsir pergi ke Bandung untuk melanjutkan studinya pada *Algemene Middelbare School* (setingkat SMA sekarang), setelah ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertamanya (HIS dan MULO) di daerah Minangkabau. Setelah Natsir memperdalam pengetahuannya tentang ilmu pendidikan, maka setelah tamat AMS pada tahun 1931, Natsir melanjutkan untuk mengikuti kursus guru diploma L.O dan tamat pada tahun 1932. Pada tahun 1927 Natsir, di AMS minatnya tentang agama Islam berkembang.

Karir sebelum terjun ke politik dimulai dengan bergabung dengan persatuan Islam (Persis). Pada tahun 1928, Natsir telah turut menerbitkan artikel dalam jurnal Persis yang bernama *Pembela Islam*. Isi artikel ini Natsir menguraikan tentang ikatan kebangsaan Indonesia. Satu tahun setelah bergabung dengan Persis, yakni 1929 Natsir kemudian juga menjadi anggota Jong Islamieten Bond yang didirikan oleh Agus Salim. Pada tahun 1932 Usaha Natsir dalam dunia pendidikan di kalangan anak-anak Islam tersebut telah ia realisasikan dengan ikut mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (Pendis), sebuah lembaga pendidikan yang didirikan. Sebelum pendudukan Jepang ada MIAI (Majelis Islman A'la Ia Indonesia) satu badan produksi perkumpulan Islam ini berdiri di daerah Surabaya tanggal 21 September 1937 Natsir ikut menjadi dalam pengurusnya.

Pada tanggal 3 April 1950 akhirnya “mosi Integral” diterima secara utuh oleh DPR dan atas dasar itu Perdana Menteri Hatta mengadakan perundingan antara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT) untuk secara bersama-sama melebur diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada pihak-pihak yang merasa terkalahkan. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, menurut Natsir, pemerintah hendaknya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian. menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu yang akhir-akhir ini dengan cara integral dan program yang tertentu. Kabinet Natsir yang terbentuk 6 September 1950 tersebut dikenal sebagai *zaken kabinet*, komposisi anggota

kabinetnya terdiri dari 4 orang Masyumi, 2 PSI, 2 PIR, 2 Kristen (Katolik dan Protestan), 1 PSII, 1 Demokrat, dan 4 tanpa partai. Akhirnya Mohammad Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Sukarno. Pada 21 Februari 1957, Presiden Sukarno mengumumkan apa yang dikenal kemudian sebagai Konsepsi Presiden, di hadapan para pemimpin partai politik dan pemimpin ABRI. Konsep ini kemudian merupakan konsep Demokrasi Terpimpin yang pada dasarnya menyangkut dua hal, yaitu (1) pembentukan suatu sistem pemerintahan baru, dan (2) pembentukan Dewan Nasional. Munculnya Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara yang berupa tuntutan terhadap pemerintah pusat. Pada 13 Februari 1958, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan keputusan pemerintah tentang penolakan terhadap tuntutan Padang. Dilanjutkan dengan pemutusan hubungan laut dan udara dengan Sumatera Tengah. Tuntutan daerah akhirnya tidak dipenuhi dan bahkan dijawab dengan gerakan militer, maka PRRI diumumkan oleh Dewan Perjuangan.

B. Kesimpulan Paedagogis

Kabinet Natsir ini adalah kabinet pertama pada periode NKRI dipimpin oleh Partai Islam Indonesia Masyumi. Pada masa Perang Kemerdekaan dan Diplomasi, 1945-1950, tidak pernah ada Kabinet yang dipimpin oleh Partai Islam Indonesia Masyumi. Baru setelah terbentuknya NKRI, untuk pertama kalinya Presiden Soekarno memercayakan kepada

Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masyumi untuk memimpin Kabinet NKRI, 6 September 1950 sampai 20 Maret 1950.

Kalau kita perhatikan dari susunan kementerian dan menteri-menterinya, Mohammad Natsir memberikan pesan tersirat kepada generasi muda Islam yang mau belajar sejarah, dan sedang mebina dirinya sebagai aktivis organisasi Islam, mengingatkan bahwa dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan partai dan pemerintahan di NKRI, memiliki seni tersendiri. Ditantang untung mampu membangun kerjasama dengan menyeleksi tuntutan politik nasional dan kekuatan partai dalam DPR. Dalam mengaplikasikan wawasan politik luar negeri harus mempertimbangkan peristiwa politik dunia yang sedang terjadi, dengan berwawasan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Saifuddin Endang, 1977. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, Jakarta: Gema Insani Press .
- Budiardjo, Miriam,ed, 1994. *Demokrasi di Indonesia: antara Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Djain, Abibullah, dkk, 1996. *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Goottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Narasi.
- Harjono, Anwar, 1997. *Perjalan Politik Bangsa*, Jakarta : Gema Insan Press.
- Kahin, George Mc Turnan, 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan dan UNS Press.
- Rosidin, Ajip, 1990. *M. Natsir, Sebuah Boigrafi*, Jakarta: Girmukti Pusaka.
- Moedjanto, G, 1988. *Indonesia Abad ke-20 II*, Yogyakarta: Kanisius.
- Madjid, Nurcholish, 2004. *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Natsir, Mohammad, 1973. *Capita Selecta I*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer Deliar, 1980. *Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia tahun 1940-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Pour Jolius, 1995. *Pengalaman Dan Kesaksian Sejak Proklamasi Sampai Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puar Abdullah Yusuf, ed, 1978. *Mohammad Natsir 70 tahun: Kenangan Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Suryanegara Mansur Ahmad, 2010. *Api Sejarah 2*, Bandung: PT Salamandani Pustaka Semesta.
- Soeharto, R, 1982. *Saksi Sejarah Menggunakan Dwitunggal*, Jakarta :Gunung Agung.
- Waluyo, 2009. *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional*, Yogyakarta: Ombak

Wangsa Widjaja,I, 1983. *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato II*, Jakarta: Inti Indayu Press.

Jurnal :

Majalah Tempo, 2 Desember 1989

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober1948

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, 4 Juli 1949

Arsip :

Anri, Resolusi Kogres besar GPPI seluruh Indonesia tanggal 15 sampai 20 Maret 1950 di Semarang.

Anri, Konggres ke III “PELADJAR ISLAM INDONESIA” pada tanggal 27 sampai 31 Maret 1950 di Bandung.

Internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Natsir.

<http://waroeng-studies.blogspot.com/2013/01/pemikiran-m-natsir-sebagai-pembaharu.html>

BIODATA PENULIS

Nama : Dwi Purwono
NPM : 11144400055
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 6 Januari 1993
Alamat : Kutu Raden, Rt/Rw : 008/015, Sinduadi, Mlati,
Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55552.

Riwayat Pendidikan :

SD : MIN YOGYAKARTA I
SMP : MTS N YOGYAKARTA I
SMA : MAN YOGYAKARTA III
KULIAH : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA